

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
KANTOR CAMAT TANJUNG BUNGA TAHUN 2023 - 2026**



**KANTOR KECAMATAN TANJUNG BUNGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan dan penyertaanNya, maka dokumen Rencana Strategi ( RENSTRA ) Kantor Camat Tanjung Bunga dapat disusun dengan baik sesuai dengan rencana.

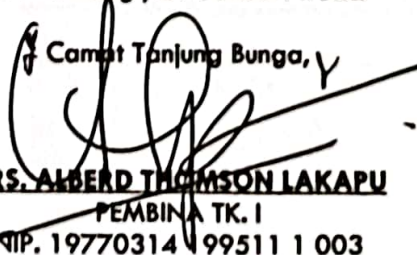
Dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kantor Camat Kecamatan Tanjung Bunga merupakan penjabaran dari Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Flores Timur sebagaimana Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 tersebut., maka sebagai organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Flores Timur, Kantor Kecamatan Tanjung Bunga harus memiliki Rencana Strategis yang mengandung Visi dan Misi, Tujuan, strategis karena itu dalam Rencana Strategis kantor Kecamatan Tanjung Bunga ini memuat evaluasi pelaksanaan tugas sebelumnya, gambaran umum dan variasi cakupan Rencana Strategis organisasi Perangkat Daerah agar kecamatan mempunyai rencana yang terarah dan berkesinambungan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas pendampingannya dan kepada Tim Kecamatan serta seluruh staf Kantor Camat Kecamatan Tanjung Bunga yang selalu berupaya melakukan hal terbaik dalam penyusunan RENSTRA Kantor Tanjung Bunga Tahun 2023 – 2026.

Harapan kami semoga dengan adanya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang nyata terhadap arah kebijakan, program dan kegiatan di Tingkat Kecamatan Tanjung Bunga.

Terima kasih.

Waiklibang , 31 Januari 2022

  
Camat Tanjung Bunga,  
**DRS. ALBERD THOMSON LAKAPU**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19770314 199511 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD KANTOR CAMAT TANGJUNG BUNGA</b>	<b>6</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.2. Sumber Daya OPD Kantor Camat Tanjung Bunga .....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tanjung Bunga .....	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	14
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS .....</b>	<b>17</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan .....	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJPD .....	20
3.3. Telaahan Renstra K/L .....	24
3.4. Penentuan Issu-issu Strategis .....	26
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>28</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD .....	28
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran OPD dan RPJMD .....	29
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>30</b>
5.1. Strategi dan Kebijakan OPD .....	30
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>32</b>
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran	32
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>34</b>

# **BAB I : PENDAHULUAN**

## **.1. Latar Belakang**

Salah satu instrumen terukur jangka menengah yang merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah adalah penyusunan dan penetapan Rencana Strategi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Secara konseptual, Rencana Strategi merupakan pernyataan langkah tindak terukur atas dasar rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja. Pernyataan indikatif lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ditargetkan yang akan dicapai dalam 5 ( lima ) tahun dengan didukung oleh Sumber Daya yang tersedia, baik dana, peralatan maupun Sumber Daya Manusia.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Tanjung Bunga Tahun 2023-2026 dilatarbelakangi oleh tuntutan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun periode ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, untuk menyusun kembali Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Daerah *Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022* serta menjalankan amanat Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berlaku untuk turut mendukung suksesnya pencapaian Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Tanjung Bunga memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja hingga Perencanaan Strategi daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 Tahun ke depan (2023-2026).

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Tanjung Bunga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Flores Timur sehingga Kecamatan Tanjung Bunga berperan aktif dalam pencapaian pembangunan dan target indikatif Kabupaten Flores Timur. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPJMD, maka disusunlah strategi yang

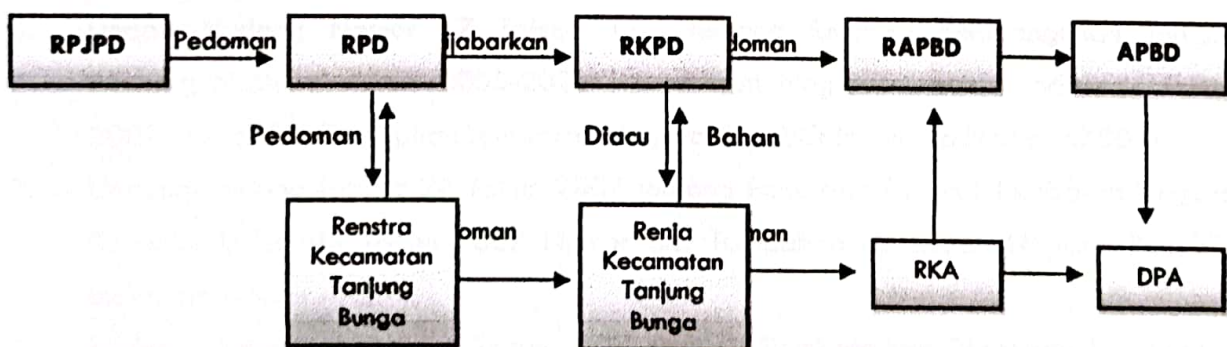
memanifestasikan Strategi Kecamatan dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Flores Timur periode 2023 –2026 secara maksimal.

Rencana Strategi (Renstra) Kantor Camat Tanjung Bunga tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJPD Kabupaten Flores Timur, RPD Kabupaten Flores Timur. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sistem, hubungan antara Renstra Kecamatan Tanjung Bunga dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJPD Kabupaten Flores Timur adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.
- 2) RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPD Kabupaten Flores Timur adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang pendanaannya dialokasikan dari APBN , APBD Provinsi.

Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

**Gambar 1.1: Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra Kantor Camat Tanjung Bunga.**



**Bagan Hubungan Renstra Kantor Camat Tanjung Bunga Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Tanjung Bunga adalah :

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 ( Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 Perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

### **.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Tanjung Bunga Tahun 2023-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Tanjung Bunga untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian program kegiatan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Tanjung Bunga.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Tanjung Bunga Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Flores Timur periode 2005-2025;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Tanjung Bunga dan perencanaan penganggaran;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Tanjung Bunga yang selaras dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur;
4. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Tanjung Bunga.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Bunga disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD KANTOR CAMAT TANJUNG BUNGA**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
- 2.2. Sumber Daya OPD Kantor Camat Tanjung Bunga.
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD Kantor Camat Tanjung Bunga.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Tanjung Bunga.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjung Bunga.
- 3.2. Telaahan Visi Daerah RPJPD Kabupaten Flores Timur
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran OPD dan Tujuan dan Sasaran RPJMD

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi dan Kebijakan OPD

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif

### **BAB. VII. PENUTUP**

## **BAB II :**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD KANTOR CAMAT TANJUNG BUNGA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kecamatan Tanjung Bunga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016. Kepala OPD Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjung Bunga berada di Waiklibang, Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur. Wilayah Yuridiksi meliputi 16 (enam belas) Desa yaitu Desa Ratulodong, Desa Sinar Hadigala, Desa Sinamalaka, Desa Bandona, Desa Bahinga, Desa Waibao, Desa Nusa Nipa, Desa Lamatutu, Desa Kolaka, Desa Lewobunga, Desa Gekeng Deran, Desa Lamanabi, Desa Aransina, Desa Latonliwo, Desa Latonliwo II dan Desa Patisirawalang.

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tanjung Bunga didukung oleh seorang Camat, seorang sekretaris, 5 orang kepala seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 8 staf Fungsional Umum .

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat.

##### **1. Fungsi Camat :**

- a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :**

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

- b. Penyusunan program dan anggaran;
  - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
  - d. Pengelolaan urusan kepegawalan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawalan :
- a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
  - b. Pengelolaan dokumen kepegawalan;
  - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
  - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
  - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
- a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
  - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
  - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Fungsi Kasie Pemerintahan :
- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Fungsi Kasie Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**7. Fungsi Kasie Pemberdayaan Masyarakat :**

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**8. Fungsi Kasie Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :**

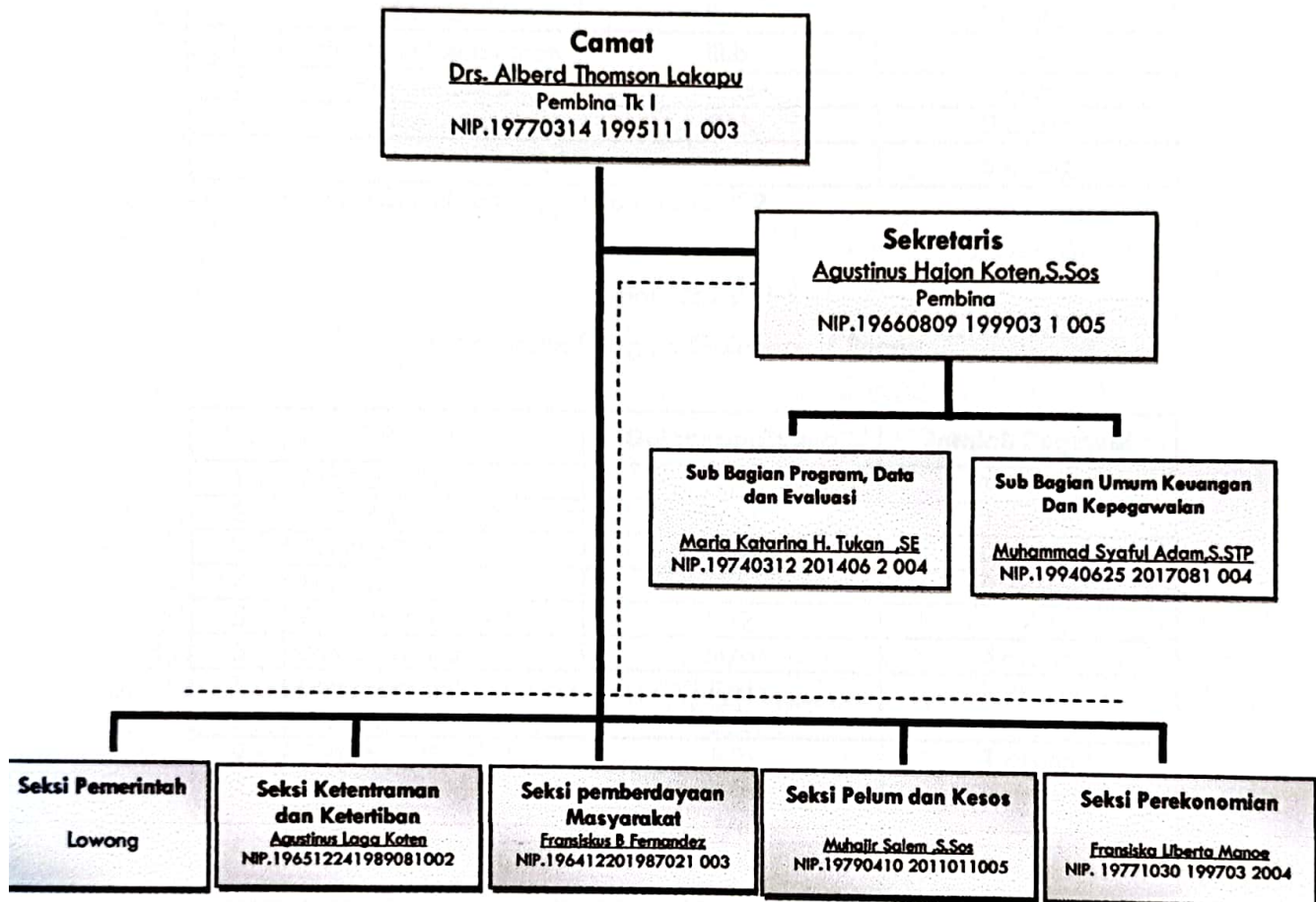
- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**9. Fungsi Kasie Perekonomian :**

- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kantor Camat Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

### Struktur Organisasi



## 2.2 Sumber Daya OPD Kantor Camat Tanjung Bunga.

### 1. Susunan Kepegawalan

Tabel 2.2.1 :

Jumlah PNS Kantor Camat Tanjung Bunga berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Camat	III.a	1 orang
2	Sekretaris Kecamatan	III.b	1 orang
3	Kepala Seksi	IV.a	4 orang
4	Kasubag	IV.b	2 orang
<b>JUMLAH</b>			<b>8 orang</b>

Sumber : Kantor Camat Tanjung Bunga Tahun 2022.

Tabel 2.2.2 :

Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tk. I	IV/b	1 orang
2	Pembina	IV/a	1 orang
3	Penata Tk.I	III/d	2 orang
4	Penata	III/c	2 orang
5	Penata Muda Tk.I	III/b	-
6	Penata Muda	III/a	4 orang
7	Pengatur Tk.I	II/d	1 orang
8	Pengatur	II/c	2 orang
9	Pengatur MD Tk. I	II/b	1 orang
10	Pengatur Muda	II/a	2 orang
11	Juru	I/c	-
<b>Jumlah</b>			<b>16 Orang</b>

Sumber : Kantor Camat Tanjung Bunga Tahun 2022.

Tabel 2.2.3 :

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
	Pasca Sarjana (S-2)	-
	Sarjana (S-1)	5 orang
	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	-
	Diploma I/Diploma II	-
	SLTA	11 orang
	SLTP	-
	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>16 Orang</b>

Sumber : Kantor Camat Tanjung Bunga Tahun 2022.

**Tabel 2.2.4 :**  
**Berdasarkan Diklat Penjenjangan**

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	1 orang-
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	-
JUMLAH		1 orang

Sumber : Kantor Camat Tanjung Bunga Tahun 2022.

## 2. Aset

**Tabel 2.2.5**  
**Asset/Modal Kantor Camat Tanjung Bunga**

No	Uraian Asset/Modal	Nilai ( Rp)
1	Tanah	329.590.500,-
2	Peralatan dan Mesin	244.390.000,-
3	Gedung dan Bangunan	448.698.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan jaringan	1.157.057.000,-
5	Aset tetap lainnya	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	0,00
	Jumlah Aset Tetap/Modal	2.179.735.500

## 2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kantor Tanjung Bunga.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Bunga dalam kurun waktu lima tahun terakhir semakin meningkat, dari arah kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Bunga yang dapat dilaksanakan :

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran;
3. Meningkatnya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan Tugas Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban serta Kemasyarakatan;
4. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban umum;
5. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja;

6. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan;
7. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
8. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama masa pendemik Covid-19 ditingkat Kecamatan;
9. Meningkatnya kebersamaan dalam Pelaksanaan pelayanan pemerintah di tingkat Kecamatan.

Tingkat Keberhasilan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanjung Bunga berdasarkan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Bunga 2017 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1  
Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Tahun 2017 - 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan, ke masyarakatan, ketertiban dan keamanan umum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase Peningkatan Pengendalian dan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, ke masyarakatan, ketertiban dan keamanan umum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	trivulanan dan semesteran																
6	Prosentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Pembangunan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %	95 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase peningkatan sistem pelayanan publik dan administrasi kepada masyarakat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Prosentase peningkatan Pelayanan Masyarakat dan pembatasan kegiatan masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 tingkat Kecamatan.	%	%	95 %	100 %	100 %	%	%	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Prosentase peningkatan kebersamaan dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kantor Camat Tanjung Bunga

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1.069.507.733,49	977.176.573,014	1.168.287.365,38	1.116.619.550,00	1.136.278.522,00	1.053.725.261,00 -	951.549.345,00	1.016.863.239,00	1.040.724.278,00	984.763263,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
Belanja Langsung	886.295.000,00	485.425.000,00	446.175.000,00	538.426.500,00	500.635.585,00	872.428.100,00	469.196.900,00	442.744.500,00	537.479.600,00	471.906.255,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00

Jumlah Belanja	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai	
1.955.802.733,49	114.375.000,00	771.920.000,00	1.069.507.733,00	
1.462.601.573,14	0,00	270.625.000,00	977.176.573,014	
1.614.462.365,38	0,00-	162.375.000,00	1.168.287.365,38	
1.655.046.050,00	0,00	200.426.500,00	1.116.619.550,00	
1.636.914.107,00	0,00	500.635.585,00	1.136.278.522,00	
1.926.153.361,00	112.375.000,00	760.053.100,00	1.053.725.261,00	
1.420.746.245,00	0,00	255.546.900,00	951.549.345,00	
1.459.607.739,00	0,00-	158.944.500,00	1.016.863.239,00	
1.578.203.878,00	0,00	199.479.600,00	1.040.724.278,00	
1.456.669.518,00	0,00	471.906.255,00	984.763.263,00	
98,48	25,98	46,98	98	
100	100	100	100	
100	100	100	100	
100	100	100	100	
100	100	100	100	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Tanjung Bunga.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih terbatasnya ketersediaan akses infrastruktur/ jalan sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara maksimal;
2. Ketersediaan Sarana perluasan jaringan Telekomunikasi di wilayah Kecamatan Tanjung Bunga masih belum maksimal sehingga Penyelenggaraan kegiatan belum tercapai optimal;
3. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur di kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

4. Ketersediaan sarana perkantoran yang belum memadai dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat;
5. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain yang dapat menciptakan sumber daya aparatur yang profesional;
6. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan di Desa;
7. Masih terbatasnya masyarakat terhadap pengembangan pariwisata;
8. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum berjalan secara maksimal;
9. Masih kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar seksi;
10. Kurangnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
11. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang belum memadai;
12. Perlu adanya Peningkatan pelayanan administrasi secara langsung kepada masyarakat;
13. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
14. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan realisasinya rencana (program dan kegiatan);
15. Masih banyak masyarakat yang belum paham dan sadar akan hukum;
16. Income perkapita masyarakat masih rendah;
17. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
18. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;

5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian, pariwisata, pembangunan infrastruktur wilayah, Perluasan akses jaringan telekomunikasi ;
7. Tersedianya potensi pertanian dan Perkebunan;
8. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
9. Adanya potensi wisata alam, Wisata Bahari, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif;

### **BAB III :**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan Tanjung Bunga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi di Kecamatan Tanjung Bunga tentunya ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjung Bunga.**

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik maka Kecamatan Tanjung Bunga harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan berdasarkan prosedur serta aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Kenyataannya masih banyak permasalahan pelayanan kemasyarakatan yang muncul yang teratasi dengan baik, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Masih belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat ini disebabkan SDM aparatur yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas serta terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran.

2. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara topografi kecamatan Tanjung Bunga cukup besar dan luas sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal sangat berdampak pada situasi jalan kurang memadai apalagi pada saat musim hujan, sehingga masih ada pelayanan yang belum maksimal dilaksanakan.

3. Belum optimalnya ketersediaan perluasan jaringan telekomunikasi dalam Pelayanan Kepada Masyarakat.

Dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat sangat didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi sehingga dapat memberikan akses informasi yang Maksimal terhadap masyarakat, terutama pada pelaku usaha untuk meningkat perekonomian, dan informasi pelayanan lainnya di wilayah Kecamatan Tanjung Bunga.

4. Belum optimal ketersediaan sarana dan prasarana.

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama terciptanya kenyamanan bagi aparaturnya untuk berkerja secara maksimal dan optimal terhadap pelayanan kepada masyarakat.

5. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan.

Peran serta dan swadaya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang belum optimal ini disebabkan telah terjadinya pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme yang menyebabkan semakin berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan juga belum optimal.

Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kantor Camat Tanjung Bunga**

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal(Diluar Kewenangan Skpd)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga- lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga- lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kemandirian aparatur kecamatan dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Hukum	Berkurang	Tinggi	Selalu mentaati hukum yang berlaku bagi aparatur	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pelayanan publik yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan publik yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pembudayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengahkai program pembudayaan ekonomi serta	program pembudayaan yang yang menyatuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pembudayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang milih
Income penduduk masyarakat	Rendah	Tinggi	Perkembangan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produk	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketertarikan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengambilan etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah
Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang kurang memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparatur yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	ketetersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketertutupan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

**Tabel 3.1. 2**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerja sama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan Investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung,	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	program pemberdayaan yang yang menyentuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang minim
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produk	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabdian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah
Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang kurang memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparatur yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	ketetersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergatalan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

**Tabel 3.1. 2**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerja sama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

### **3.2 Telahan Visi-Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.**

Dalam rangka pencapaian visi daerah RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan periode pembangunan lima tahunan keempat yakni “**Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing**”, dengan visi pembangunan daerah tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. **Flores Timur Yang Maju, Sejahtera** adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur yang mandiri dalam rangka pengembangan potensi-potensi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan pemberdayaan produktifitas masyarakat yang tinggi untuk pengembangan Sektor Pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Flores Timur yang lebih terarah, sehingga Pembangunan Kabupaten Flores Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan agar dapat terwujudnya maju, sejahtera, martabatnya masyarakat Flores Timur yang didukung oleh peningkatan pengembangan serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.
2. **Bermartabat dan Berdaya Saing** adalah terpenuhinya peningkatan kapasitas Sumber Manusia (SDM) diarahkan pada terwujudnya keseimbangan masyarakat Flores Timur dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang bermartabat.

Untuk mewujudkan visi di atas maka ada 4 (empat) misi yang dapat dikembangkan 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pariwisata, pertanian, Perkebunan dan perikanan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, perluasan jaringan telekomunikasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tanjung Bunga memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi baik sebagai penanggungjawab maupun sebagai OPD pendukung. Fokus prioritas tugas Kecamatan Tanjung Bunga dalam mendukung visi dan misi sesuai tugas dan fungsi adalah pencapaian misi ke-4 (empat) yakni **"Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik"**.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Bunga secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.1.3

**Tabel 3.1.3**

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat	Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas.</li> <li>- Sarana, prasarana dan anggaran yang</li> </ul>
2.	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur terhadap pelayanan kepada masyarakat	Masih belum meratanya mendapatkan pembangunan infrastruktur.	Rendahnya mobilisasi masyarakat dalam peningkatan hasil komoditi ke pasaran.
3.	Belum optimalnya ketersediaan Jaringan Telekomunikasi terhadap pelayanan informasi kepada masyarakat	Masih rendahnya mendapatkan perkembangan informasi dengan cepat dan baik.	Rendahnya masyarakat untuk mendapatkan Informasi dengan baik.

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.4**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**  
**(RPJPD )**

Visi: " Flores Timur yang Maju , Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing "				
No	Misi dan Program RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik</b>			
	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Keterbatasan dana serta efektivitas pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Adanya dukungan dana dalam pelayanan administrasi perkantoran
	<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Keterbatasan dana pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional	Adanya dukungan dana dalam penyediaan sarana prasarana aparatur serta adanya komitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik
	<b>3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Rendahnya kapasitas dan etos kerja aparatur kecamatan	Pendidikan aparatur yang masih rendah dan minimnya diklat	Adanya komitmen akan adanya profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan
	<b>4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan yang belum optimal	Pengendalian dan evaluasi yang belum didukung dengan data yang baik serta kurangnya pengawasan dan kontroling	Tersedianya sarana teknologi dan tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik
	<b>5. Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan</b>	Kurang maksimalnya peran kelembagaan dan pengelolaan keuangan desa	Perencanaan dan pelaporan yang belum efektif serta kurangnya pengawasan	Adanya dukungan dana dan fungsi pengawasan Kelembagaan yang baik.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana strategis (Renstra) Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5

1.	Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas pengelolaan keuangan, Kualitas dan akuntabilitas pemerintahan desa, Kapasitas dan profesionalisme	Kurangnya disiplin/kesadaran aparaturnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta minimnya sarana dan prasarana yang ada.	Kompetensi dan Sumber Daya aparaturnya yang tidak mendukung menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik	Bimtek dan Motivasi serta metode kerja yang sistematis sesuai pembagian tupoksi
----	---	---	---	---

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional ditetapkan kebijakan penataan ruang yang meliputi :

1. Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang;
2. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sektor pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
3. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi;
4. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan serta minapolitan berbasis perikanan dan ekowisata dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

5. Pengembangan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten Flores Timur sebagai kawasan perikanan, kawasan wisata dan sebagai kawasan suaka margasatwa; dan
6. Mempertahankan fungsi dan peran kawasan pertahanan dan keamanan di kecamatan Tanjung Bunga. Sementara Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas lahan yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun.

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada RTRW</li> <li>- Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Tata Ruang</li> <li>- Dokumen perencanaan belum optimal memperhatikan dokumen Tata Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada RTRW</li> <li>- Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang</li> </ul>

Permasalahan dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur .
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah :
  - a). Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal;

- b). Tidak tersedianya tenaga teknis.
- c). Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

Ditinjau dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, Kecamatan Tanjung Bunga dapat direncanakan pengembangan pariwisata, budidaya pertanian dan hortikultura, budidaya peternakan, dan permukiman. Berikut terdapat faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan pelayanan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan.

**Tabel 3.4.**  
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanjung Bunga berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengembangan wilayah Pariwisata, Hutan Produksi, Budidaya Pertanian dan Hortikultura, Budidaya Peternakan, dan pengembangan Permukiman	Dalam hal pemberian pelayanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur namun mendukung rencana tercapainya pembangunan pemerintah kabupaten yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengacu pada arah kebijakan yang ada/ditetapkan	Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan kecamatan dan tidak ada sosialisasi tentang aturan/regulasi yang berhubungan dengan RTRW/KLHS serta pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah	Komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur.

#### 1.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Tanjung Bunga maupun Visi dan Misi pembangunan daerah, yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang

berpengaruh untuk itu perlu dicari alternatif pemecahannya. Isu Strategis dalam perencanaan strategis OPD Kecamatan Tanjung Bunga merupakan kondisi actual yang perlu diperhatikan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Tanjung Bunga dalam lima tahun ke depan dirumuskan berdasarkan fakta permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Tanjung Bunga sebagai berikut :

- Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berdampak pada kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan dan Desa;
- Belum adanya disiplin dan kesadaran aparatur didalam menjalankan tupoksi;
- Kurangnya Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

## BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Bunga Tanjung.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.1.1 :  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Tanjung Bunga

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Misi 4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik								
1.	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efisien	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.	75%	80%	85%	95%	100%

## **1.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjung Bunga mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Visi**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang di mana Visi Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yakni :

**"FLORES TIMUR YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERDAYA SAING"**

### **2. Misi**

Sedangkan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Bunga yaitu Misi ke-4 yakni : **"MEWUJUDKAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK "**

Dari Misi ke - 4 ini maka tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan data tabel 4.1. mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang tujuan dan sasaran RPJPD. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Bunga untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

**Tujuan : Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik**

**Sasaran : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Kantor Camat Tanjung Bunga**

Strategi merupakan ilmu, seni atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam mengelola setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (added value) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap langkah/tahapan berbeda-beda tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang diinginkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis kecamatan Tanjung Bunga yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Tanjung Bunga menetapkan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut :

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saling.			
Misi 4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> <li>- Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.</li> <li>- Penataan sistem administrasi ASN.</li> <li>- Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu.</li> <li>- Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu.</li> <li>- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>- Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur.</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **1.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Camat Tanjung Bunga adalah :

- 1. Penunjang Urusan Pemerintahan:**
  - a. Penyediaan Barang dan Jasa Kantor;
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
  - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.;
  - e. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
  - f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  - g. Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
- 2. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**
  - a. Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan
  - b. Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan.
  - c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan.

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD Kantor Camat Tanjung Bunga Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan																								
No	Tugas	Sumber	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program dan Kegiatan	Rincian	Tahun 2022				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD				Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Menyusun penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	99%	100%	30.000.000,00	100%	31.000.000,00	100%	32.000.000,00	100%	32.500.000,00	100%	33.500.000,00	100%	34.000.000,00								
2	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dana Lembur Borongan	12 Bulan	7 Dokumen	30.000.000,00	100%	31.000.000,00	100%	32.500.000,00	100%	33.500.000,00	100%	35.500.000,00	100%	36.000.000,00	Kantor Camat							
3	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Administrasi Keuangan perspektif Daerah	100%	100%	100.000,00	100%	150.000,00	100%	200.000,00	100%	250.000,00	100%	300.000,00	100%	350.000,00	Kantor Camat							
4	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Untuk Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100.000,00	100%	150.000,00	100%	200.000,00	100%	250.000,00	100%	300.000,00	100%	350.000,00	Kantor Camat							
5	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum perspektif Daerah	99%	100%	74.100.000,00	100%	75.200.000,00	100%	76.125.000,00	100%	77.250.000,00	100%	78.025.000,00	100%	79.150.000,00	Kantor Camat							
6	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya untuk Alat Listrik Penerangan Kantor	12 Bulan	6 Komponen	3.000.000,00	100%	3.100.000,00	9 jenis	3.450.000,00	200 jenis	3.500.000,00	200 jenis	3.550.000,00	200 jenis	3.565.000,00	Kantor Camat							
7	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan, Alat Tulis Kantor, Barang Alat Kebersihan	12 Bulan	22 Jenis	20.000.000,00	100%	20.550.000,00	18 jenis	20.750.000,00	100 jenis	21.000.000,00	100 jenis	21.100.000,00	100 jenis	21.150.000,00	Kantor Camat							
8	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bays Foto Copy dan Pengikatan	12 Bulan	37500 buku/lembar	10.000.000,00	100%	10.100.000,00	30.000 lb	10.250.000,00	1 Tahun	10.500.000,00	1 Tahun	10.725.000,00	1 Tahun	11.000.000,00	Kantor Camat							
9	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	1 jenis	1.100.000,00	100%	1.150.000,00	3 jenis	1.250.000,00	50 jenis	1.500.000,00	50 jenis	1.750.000,00	50 jenis	2.225.000,00	Kantor Camat							
10	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dana untuk Makanan dan Minuman Rapat serta Tamu	12 Bulan	250 OK/Do	15.000.000,00	100%	15.150.000,00	1 jenis	15.175.000,00	1 jenis	15.250.000,00	1 jenis	15.350.000,00	12 Bulan	15.500.000,00	Kantor Camat							
11	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya untuk perjalanan Dinas	12 Bulan	25 Kali	25.000.000,00	100%	25.150.000,00	300 dos	25.250.000,00	1 Tahun	25.500.000,00	1 Tahun	25.550.000,00	1 Tahun	25.750.000,00	Kantor Camat							
12	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	153.500.000,00	100%	216.000.000,00	100%	223.700.000,00	100%	223.700.000,00	100%	223.700.000,00	100%	223.700.000,00	Kantor Camat							
13	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya untuk Material	12 Bulan	150 lembar	1.000.000,00	100%	1.050.000,00	200 lembar	1.150.000,00	200 lembar	1.250.000,00	200 lembar	1.550.000,00	250 lembar	2.000.000,00	Kantor Camat							
14	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	8.500.000,00	100%	8.550.000,00	12 bulan	8.750.000,00	12 bulan	9.000.000,00	12 bulan	9.150.000,00	12 bulan	10.000.000,00	Kantor Camat							
15	Menyusun Tata Pemerintahan Yang Baik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Belanja Tenaga Administrasi Perkantoran	12 Bulan	15 Orang	144.000.000,00	100%	207.000.000,00	15 orang	207.000.000,00	15 orang	207.000.000,00	15 orang	207.000.000,00	15 orang	270.000.000,00	Kantor Camat							

[illegible]

## BAB VII : PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Bunga Tahun 2023 – 2026 ini merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran Perangkat Daerah dan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dengan harapan bahwa Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 – 2025.

Renstra Kecamatan Tanjung Bunga akan menjadi landasan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Tanjung Bunga Tahun 2023 – 2026 ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Daerah kabupaten Flores Timur setiap akhir tahun anggaran.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Bunga ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Waiklibang, 31 Januari 2022

W. Camat Tanjung Bunga, r

**DRS. ALBERD THOMSON LAKAPU**

PEMBINA TK. I

NIP. 19770314 199511 1 003